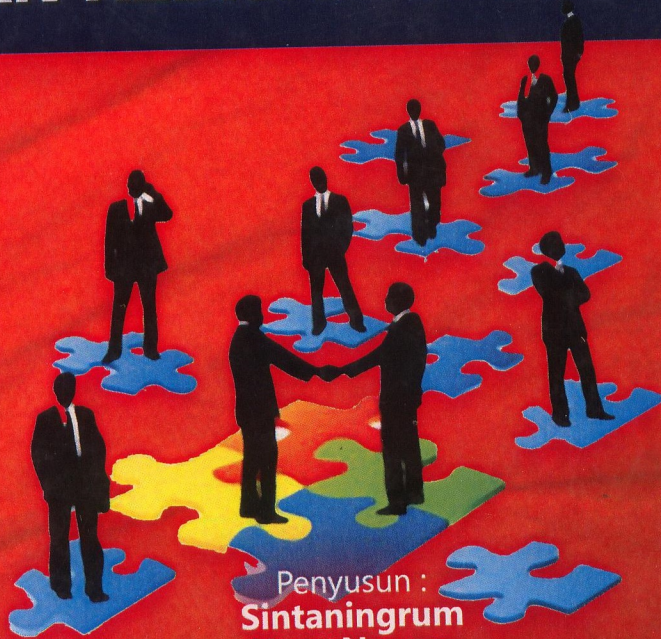


TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA:

PERSPEKTIF POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK



Penyusun :
Sintaningrum
Heru Nurasa
Yogi Suprayogi Sugandi

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI
NEGARA; PERSPEKTIF POLITIK
DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Penyusun :
**Sintaningrum
Heru Nurasa
Yogi Suprayogi Sugandi**



Falsafa

2011

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI
NEGARA; PERSPEKTIF POLITIK
DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Sintaningrum; Heru Nurasa;
Yogi Suprayogi Sugandi

Desain Cover & Lay Out
What If Artwork

Cetakan Pertama, Juni 2011

ISBN 978-602-99311-3-6

Penerbit

Falsafa

Jl. Kembang Raya No. 11, Kwitang Senen,
Jakarta Pusat

kurniaesa.script@gmail.com

Pemesanan Buku

Penerbit Falsafa

Jl. Kembang Raya No. 11, Kwitang Senen,
Jakarta Pusat

kurniaesa.script@gmail.com

Pengantar

Alhamdulillah *rabbi* *'aalamin*, buku transformasi administrasi negara dengan dua jilid ini adalah kumpulan makalah yang di dapat dari konferensi administrasi negara ketiga di Bandung pada 6-8 Juli 2010, konferensi administrasi negara yang dilaksanakan di Bandung ini adalah keterusan dari konferensi administrasi negara satu dan dua yang dilaksanakan di Yogyakarta (UGM) dan Surabaya (Unair). Berbagai kumpulan makalah ini yang sangat banyak diterima oleh panitia konferensi menyebabkan tidak semua makalah masuk dalam buku ini. Walaupun ada berbagai makalah yang tidak diterima dalam buku ini dikarenakan faktor teknis seperti makalah sudah diterbitkan ditempat lain dan sebagainya.

Hasil-hasil dari makalah ini mengalami proses editing oleh tiga editor dari konferensi administrasi negara tiga. Buku pertama yang berjudul transformasi administrasi negara: perspektif manajerialisme, mengemukakan berbagai perubahan dalam konsep manajemen pada sektor publik. Kemudian buku kedua yang berjudul transformasi administrasi negara: perspektif politik dan kebijakan publik ini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama setelah era reformasi saat ini, dimana politik suatu bangsa sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakannya.

Makalah-makalah ini mengalami proses editing sehingga ada beberapa kata-kata, kalimat atau tanda yang berubah, tetapi tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya. Proses editing ini memakan waktu yang sangat lama karena berbagai makalah tersebut memang memiliki kekhasan masing-masing, sehingga kami memerlukan penelaahan dan terkadang perlu mengkonfirmasi ulang pada para penulis.

Kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan para teman-teman di program studi ilmu administrasi negara, FISIP, UNPAD serta LP3AN (Lembaga Penelitian, Pelatihan dan Pengkajian Administrasi Negara) yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara konferensi ini sehingga dapat berlangsung dengan baik.

Pada momen ini juga perlu kami sampaikan pada konferensi administrasi negara ketiga ini juga tercetus suatu organisasi ilmu administrasi publik yang diharapkan menjadi ajang silaturahmi para pakar dan pemerhati administrasi negara di Indonesia. Kami haturkan juga terima kasih yang tidak terkira pada IAPA (*Indonesia Association for Public Administration*) yang sudah menjadi wadah perkumpulan ilmuwan dan pemerhati administrasi negara. Buku ini diluncurkan pertama kali di Konferensi Administrasi Negara keempat di Makasar, agar momen dari konferensi ini tidak berkurang, dan pemakalah tertarik lagi untuk menulis makalahnya di konferensi-konferensi berikutnya.

Terakhir kami harap, buku kumpulan makalah ini dapat memberikan makna yang besar bagi para pemerhati dan pakar administrasi publik, baik secara konsepsi ataupun praktis.

Bandung, 31 Mei 2011

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

Demokrasi dan Politik

Rekonseptualisasi Negara dan Pembangunan Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Mensejahterakan (Caroline Paskarina) (15)

Penegakan Hukum Atas Kasus "Money Politik"/Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Setiadin) (29)

Evaluasi Kebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 (Rosita Novi Andari S.Sos.) (51)

Politik Pembentukan Kebijakan (Tauran, S.Sos, M.Soc.Sc.) (71)

Kebijakan Publik

Inovasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai: Tarik-Menarik Antara Mission Driven dan Rule Driven (Dwi Harsono) (93)

Kapitalisme "Ngayau" Mutasi Genetika Kebijakan Kapitalisasi Perkebunan Menjadi Kapitalisme Perkebunan (Muslih Amberi) (111)

Kongruensi Partai Politik, Kepala Daerah Dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Model Formulasi Kebijakan Di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Hendri Koeswara, S.Ip, M.Soc.Sc.) (133)

Interaksi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar (Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.) (153)

"Demokrasi dan Kebijakan Publik (Ike Wanusmawatie) (175)

Studi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat (Roni Ekha Putera, S.Ip, M.Pa) (195)

Pengaruh Implementasi Kebijakan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik Untuk Guru Terhadap Kompetensi Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dr. Sofjan Aripin) (219)

Otonomi Daerah

Pendaerahan Pbb dan Bphtb Dalam Kerangka Perluasan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Achmad Lutfi) (255)

Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultural (Bambang Supriyono) (271)

Transisi Demokrasi Lokal Dalam Komunitas Elite Politik Minangkabau Modern (Tengku Rika Valentina, Andri Rusta, Nicky Nia Gustriani) (287)

Reformasi Birokrasi

Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Dalam Impelementasi Otonomi Daerah di Indonesia (Budi Hartono, SE., M.Si.) (311)

Efektivitas Fungsi Auxiliary Servises di Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Palembang) (Rr. Harida Indraswari, S.Sos.) (327)

Partisipasi Masyarakat

Kemitraan Antar Aktor Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kota Gorontalo (Drs. Dikson Junus, Mpa) (351)

Mengadvokasi Anggaran Daerah Melalui Penguatan Masyarakat Berbasis Agama Untuk Kebijakan Anggaran Yang Mensejahterakan (Rozidateno Putri Hanida) (373)

"Pemberdayaan Petani Tambak Melalui Pengembangan Budidaya Perikanan (Dra. Diana Hertati, M.Si., Dra. Susi Hardjati, Map) (383)

Etika Administrasi

Nilai Lokal Bagi Pejabat Publik (Asep Sumaryana) (403)

Kajian Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Wisber Wiryanto) (409)

Transformasi Administrasi Negara: Perspektif Politik dan Kebijakan Publik

Heru Nurasa¹

Sintaningrum²

Yogi Suprayogi Sugandi³

Abstrak

Makalah ini akan menyampaikan transformasi administrasi negara dalam perspektif politik dan kebijakan publik. Perubahan politik di Indonesia menyebabkan berbagai sendi kehidupan di tanah air menjadi ikut berubah, perubahan ini didapat dari dalam dan juga dari luar. Perubahan ini sangat mendasar dari demokratisasi politik di Indonesia, sehingga secara langsung mempengaruhi pola kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Struktur pemerintahan daerah yang diberikan otonomi lebih menyebabkan struktur politik dan kebijakan-pun menjadi berubah drastis, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif untuk menterjemahkan keinginan masyarakat. Menterjemahkan keinginan ini dapat menjadi multitafsir sehingga, perubahan ini perlu ada pembatas yang jelas. Makalah ini juga akan menyampaikan beberapa hasil makalah dari konferensi administrasi negara tiga di Bandung, dengan berbagai temuan tentang hukum, politik dan kebijakan di beberapa daerah dan juga pusat.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan Publik dan Perubahan.

Pendahuluan

Keunikan administrasi negara yaitu terletak pada fondasi ilmu ini sendiri yaitu politik dan kebijakan publik. Politik merupakan ilmu yang pertama kali menjelaskan fenomena administrasi publik, kekuasaan dan kewenangan merupakan kajian ilmu politik. Politik merupakan "*art of possibilities*" atau seni tentang segala kemungkinan, dalam politik segala aspek kehidupan dapat dipolitisasikan, politik juga merupakan salah satu ide yang dapat dihasilkan oleh manusia atau disebut juga bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* atau manusia politik. Kelabilan dan keabu-abuan politik ini harus diformalisasi dalam bentuk hukum positif yang dapat dimengerti oleh semua pihak, politik bersifat abstrak dan sangat luas, oleh karena itu perlunya pembatasan dalam koridor kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan ilmu pembeda dengan ilmu dasar lainnya seperti sosiologi, antropologi, kimia, dan sebagainya. Sebagai ilmu, kebijakan publik merupakan ilmu yang sangat diperlukan oleh para administrator untuk menterjemahkan kehendak dari para politisi yang merupakan wakil rakyat. Perubahan yang terjadi dalam politik di Indonesia satu dasawarsa terakhir menyebabkan

Politik dalam Arus Demokrasi

Bentuk terpenting dari trend negara modern saat ini adalah dikaitkannya negara modern dengan demokrasi, kemudian produk ekonomi kapitalis dan ekonomi pasar. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan sengit antara para ilmuwan saat ini. Konsep awal demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demokratia*. *Demo* berarti rakyat dan *Kratos* artinya memerintah. Arti dasar kata demokrasi adalah sistem politik yang

¹ Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung.

² Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung.

³ Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung.

diperintah oleh rakyat, bukan kalangan monarki atau aristokrat. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Seperti disinggung oleh David Held, pertanyaannya bisa dialamatkan pada setiap frasa berikut: Memerintah, Pemerintahan oleh dan Rakyat.

o Frasa rakyat, yaitu:

1. Siapa yang dimaksud dengan "rakyat" itu?
2. Dalam bentuk apa partisipasi rakyat?
3. Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjamin partisipasi rakyat?

o Frasa Memerintah, yaitu:

1. Sejauhmana lingkup memerintah itu? Apakah terbatas kepada bidang pemerintahan atau ada demokrasi industri?
2. Apakah memerintah mencakup keputusan sehari-hari yang harus diambil oleh pemerintah, atau hanya mengacu ke keputusan kebijakan utama saja?

o Frasa Diperintah oleh, oleh yaitu:

1. Apakah perintah "rakyat" harus dipatuhi? Bagaimanakah mengukur kepatuhan dan pembangkangan?
2. Apakah ada kemungkinandimana beberapa "rakyat" bertindak diluar hukum, jika mereka percaya bahwa hukum yang ada tidak adil?
3. Kapan Pemerintah Demokrasi menggunakan cara kekerasan terhadap mereka yang dianggap menentang kebijakan pemerintah?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi beragam sesuai periode waktu dan masyarakat. Misalnya, "rakyat" sebelumnya sudah menyadari bahwa mereka adalah sebagai pemilik, baik kulit putih kalangan terdidik, rakyat awam, orang dewasa pria dan wanita. Pada bidang politik saja, sedang di masyarakat lain, demokrasi meliputi kehidupan sosial lainnya.

Peranan perubahan dalam masyarakat Indonesia sendiri dalam politik sangat besar, ini juga menjadi faktor pendorong memproduksi kebijakan yang baik. Perubahan politik yang sangat besar di Indonesia juga menyebabkan arus demokrasi sedikit menyerupai konsep liberalisme, bahkan ada kecendrungan untuk bersembunyi di balik liberalisme pasar, ini diperlihatkan dengan pasar makro di Indonesia terbuka sangat besar jika dibandingkan dengan beberapa pasar makro di beberapa negara di Asia Tenggara. Roda pembangunan di tanah air menjadi semakin liberal dan bebas, ini dikarenakan masyarakat salah mengartikan demokrasi sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab. Sehingga peranan administrasi negara sebagai agen pelaksana dari kebijakan menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelum era reformasi.

Arus demokratisasi di Indonesia juga menghambat peran penegakan hukum. Peran penegakan hukum menjadi terbiaskan oleh unsur-unsur politik yang memang sangat abu-abu, sehingga banyak kasus penegakan hukum di tanah air jika dibawa ke arah politik, penegakan hukum tersebut akan menjadi tidak kuat dan cenderung di lemahkan. Belum lagi kasus-kasus politik lokal dimana politik lokal juga memiliki peran yang sangat besar dalam merubah pembangunan kebijakan di tanah air.

Kebijakan Publik Indonesia sebagai Produk Demokratisasi

Arus demokrasi di tanah air ini menjadi salah satu bahan yang memperkuat kebijakan publik di Indonesia. Peran serta masyarakat sebagai salah agen perubah dalam kebijakan publik juga memiliki bagian yang sangat penting, ini dapat kita lihat dengan semakin besarnya pengawasan masyarakat pada kekuasaan. Berbagai kebijakan menjadi lebih terasa kental pada masyarakat Indonesia. Ilmu kebijakan sebagai salah satu cara menerjemahkan berbagai keinginan masyarakat ini perlu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan politik, karena kebijakan sendiri sangat terukur dan mudah untuk dilihat.

Ilmu kebijakan sendiri mencakup metode penelitian proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan dan hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan inteligensi di era kita sekarang (Laswell, 1951). Bahkan laswell (1987) menuliskan bahwa ada dua pendekatan utama dalam mendefinisikan kebijakan, yang pertama adalah term pengetahuan dalam proses politik dan pengetahuan tentang proses politik. Analisis kebijakan yang merupakan bagian dari sistem suatu kebijakan berkaitan dengan pengetahuan dalam, dan untuk, proses politik. Sedangkan proses kebijakan berkaitan dengan pengetahuan tentang formasi dan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik dalam berbagai literatur politik merupakan "*problem solver*" sebagai pemecah masalah dari kebuntuan politik. Pemecahan masalah ini oleh Herbert Simon dituliskan sebagai pola pengambilan keputusan dengan mengenyampingkan tindakan subyektif dan rasional. Simon menuliskan tentang arti intelegensia, desain, dan pilihan.

Tujuan kebijakan publik dalam Riant Nugroho (2010) menuliskan ada dua yaitu pemahaman secara *distributif vs redistributif, dinamisasi vs stabilisasi, memperkuat negara vs pasar dan regulatif vs deregulatif*, pemahaman distributif sendiri yaitu mendistribusikan sumber daya negara, diatributif ini merupakan lawan dari *absortif* yang memiliki makna menyerap sumber daya negara. Sedangkan dinamisasi Riant Nugroho (2010) menuliskan dengan kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya negara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, lawan dari dinamisasi ini sendiri adalah stabilisasi yang menekankan pada kebijakan secara kaku. Sedangkan kebijakan memperkuat negara atau memperkuat pasar yaitu bagaiman peran negara mempertahankan monopolinya terhadap sumber-sumber negara melawan sumber-sumber yang dimiliki oleh pasar yang memiliki kemampuan untuk mengatur sendiri, jika dibiarkan terjun bebas maka rakyat akan dikorbkan, namun jika terlalu di monopoli maka tidak akan berkembangnya sektor pasar ini dan negara diambang menjadi negara otoriter. Tujuan kebijakan terakhir adalah kebijakan regulatif melawan kebijakan *deregulatif* yang maksudnya regulatif ini mengatur dan *membatasi*.

Menurut David Easton, "*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*", kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoah 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan

atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich adalah *"Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose"*, merupakan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye sendiri *"Public policy is whatever governments choose to do or not to do"*, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah.

Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan James E. Anderson berpendapat bahwa *"Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials"* atau kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administrative saja. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Berbagai perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia sangat terasa pada sendi-sendi bangsa, ini diperlihatkan dengan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh pemerintahan. Sehingga sangatlah wajar jika beberapa tahun ini demonstrasi atau kritik-kritik terhadap pemerintah mudah dicari, dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Politik ini juga sampai pada tahap pemerintahan daerah dimana masyarakat di daerah dapat memilih wakil-wakil rakyatnya langsung. Kebijakan-kebijakan pro daerah pun sudah lazim kita dapat, misalnya berbagai pungutan, retribusi atau pajak yang diambil oleh daerah tersebut merupakan salah satu semangat reformasi politik di Indonesia yang mengedepankan pembangunan-pembangunan di daerah.

Negara Kebijakan

Konsep negara kebijakan diperkenalkan pertama kali oleh Rosenbloom (1999), konsepsi ini sebagai salah satu peran negara dalam mendekati diri dengan masyarakatnya. Negara kebijakan yang diperkenalkan tersebut oleh Rosenbloom tersebut disebut juga dengan negara prosedural, dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat perlu diprosedurkan secara terperinci, seperti sasaran, targetnya, cara pelaksanaannya dan sebagainya.

Kebijakan di Indonesia saat ini juga mengalami inovasi yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Kebijakan di daerah sangat mendominasi kebijakan di tanah air, namun kualitas kebijakan ini sendiri masih jauh dari harapan

masyarakat. Selain itu juga peranan pemerintah pusat masih sangat besar dalam berbagai sektor, yang sebetulnya sektor tersebut sudah bukan ranah pusat, semisal nya pembangunan jalan yang masih di dominasi oleh pusat padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke empat menuliskan bahwa pemerintah pusat hanya mengatur empat (4) sektor yaitu, agama, keamanan, moneter/keuangan, kehakiman.

Namun masih besarnya peran pemerintah pusat terhadap berbagai sektor pembangunan dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah yang belum siap untuk membangun daerahnya. Seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia di daerah yang sangat terbatas sangat mempengaruhi berbagai produk kebijakan mendapat kegagalan. Transformasi terutama terjadi pada pemerintahan di daerah ketika dalam penyusunan dan melaksanakan suatu kebijakan, ada juga kebijakan yang dilakukan di pusat namun pelaksanaan di daerah sehingga menyebabkan para pelaksana kebijakan di daerah susah menerjemahkan kebijakan dari pusat. Saling tumpang tindih kebijakan juga berlangsung di beberapa daerah dan pusat, ini juga memberikan preseden buruk bahwa pemerintah kurang dalam koordinasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan di Indonesia yang disebabkan arus demokrasi di Indonesia lebih banyak di dominasi ketidak siapan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan.

Oleh karena itu dalam memahami kebijakan publik aparat perlu dibekali dengan konsepsi sosialisasi, pemberdayaan dan partisipasi yang memang ini adalah teori dalam sosiologi, yang perlu dikembangkan dalam membangun keterkaitan pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Karena untuk kasus-kasus kebijakan di Indonesia penulis melihat kualitas hasil kebijakan sudah sangat bagus, namun dalam tahap pelaksanaan cenderung sangat lambat dan jauh dari harapan. Oleh karena itu penulis menganggap bahwa pemerintah perlu mendekatkan diri dengan masyarakat terutama dalam pemberdayaan, partisipasi dan sosialisasi. Konsepsi pemberdayaan sendiri sebetulnya bukanlah barang baru di dunia administrasi publik sebenarnya konsep ini berkembang pada awal 1980an oleh konsepsi Friedman (1985) beliau menuliskan bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah perlu memberikan kesepahaman dengan masyarakat akan arti pentingnya suatu kebijakan, karena untuk berbagai kasus kebijakan di era tersebut pemerintah dianggap tahun segalanya tentang masyarakat sehingga pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh para penguasa, sehingga cerminan kebijakan sebagai keputusan dari masyarakat tidaklah tepat.

Partisipasi dalam kebijakan publik juga merupakan hal yang sangat serius perlu ditekankan dalam kebijakan publik, walaupun kebijakan itu berkaitan dengan suatu barang atau kebendaan, namun barang dan kebendaan tersebut merupakan keperluan manusia. Sehingga ilmu kebijakan sendiri menurut Laswell merupakan ilmu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri.

Kemudian sosialisasi sendiri ini merupakan bentuk dari *distribution of information* yang mengedepankan arti penting penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat luas, agar mendapat perhatian serius. Masyarakat mengetahui ini agar mempermudah kebijakan itu sendiri dan juga sebagai perwujudan transparansi dan akuntabil-

itas publik. Penilaian kebijakan itu sendiri seyogyanya tidak dinilai oleh pemerintah itu sendiri, karena jika dinilai oleh pemerintah itu sendiri maka tidak akan tersedia keseimbangan antara penguasa dan yang dikuasai, serahkan penilaian itu kepada pihak ke tiga (LSM, lembaga auditor publik, para akademisi, atau wakil-wakil masyarakat). Keseimbangan dalam menilai kebijakan publik ini merupakan bentuk dari semakin besarnya peran masyarakat dalam konsensus kebijakan.

Kesimpulan dan Saran

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kebijakan di Indonesia menuju lebih dinamis merupakan hal yang sangat positif bagi masyarakat, namun para penterjemah dan pelaksana kebijakan dituntut untuk lebih jeli dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Dalam mewujudkan perubahan yang sangat signifikan dalam kebijakan tersebut tingkat responsivitas para implementor memang harus mampu melaksanakan berbagai pendekatan pada masyarakat.

Akhirnya penulis memberikan saran bahwa kemampuan merubah politik perlu diikuti juga dengan kemampuan para penterjemah dan pelaksana kebijakan, sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran lebih merasakan peran perubahan dalam kebijakan yang ada di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Lindblom, Charles E. 1968. *The Policy Making Process*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Moekhsen, Nuraida. 2004. "Kebijakan Sistem Renumerasi PNS 2001-2009, Sebuah Usulan". Dalam Layanan Publik Edisi Ketiga Tahun I, November.
- Pollitt, Christopher dan Geert Bouckaert. 2004. *Public Management Reform: A Comparative Analysis* (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Mishan. 1990. *Public Goods and Natural Liberty*. Oxford, Claredon Press, London.
- Musgrave, R.A. and Peggy, B.M. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition, Mc Graw-Hill Book Company, New York.
- Myles, G.D. 1997. *Public Economics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Rais, Amin (1986), *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta
- Bennett, Robert (ed). 1994. *Local Government and Market Decentralization : Experiences in Industrialized, Developing, and Former Eastern Bloc Countries*. Tokyo, New York, Paris: United Nations University Press.

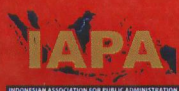
TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA:

PERSPEKTIF POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan cukup pesat di Indonesia, ini diperlihatkan dengan semakin tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang bergerak di bidang administrasi negara. Administrasi negara sendiri di Indonesia memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pandangan.

Ada dua pandangan atau perspektif yang tertarik akan diangkat dalam judul buku ini, perspektif pertama adalah perspektif manajemen dan kedua adalah perspektif politik dan kebijakan publik. Dalam sudut pandang manajemen sendiri administrasi negara ditempatkan sebagai pelaksana dan pengeksekusi berbagai aktifitas di dalam negara, sedangkan dalam perspektif politik dan kebijakan publik, administrasi negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas di dalam negara. Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang saling lengkap melengkapi dari perkembangan administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini dengan berbagai perkembangan nomenklatur, mulai dari ilmu tata negara, administrasi negara, administrasi publik dan yang sampai mutakhir ini ilmu manajemen dan kebijakan publik. Perkembangan inilah yang dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu, pandangan ini di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchuck (2009) tentang core ilmu administrasi negara antara lain hukum, politik dan manajemen, perspektif ini juga didukung oleh Eran V. Gadot (2001) yang menuliskan core ilmu administrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu budaya dan sosiologi serta politik dan kebijakan publik.



REFERENSI

ISBN 978-602-99311-3-6



9 786029 993113